

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan. Dilihat bahwa suatu pembangunan desa diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan didalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa merupakan suatu perpaduan yang harmonis dan serasi antara dua kelompok kegiatan utama yaitu berbagai kegiatan pemerintah sebagai kelompok pertama dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai kelompok utama yang kedua. Dalam pasal 78 UU No.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan Sarana dan Prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi local serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan desabukan saja ditentukan oleh adanya peranan pemerintah saja melainkan juga tergantung dari peran atau partisipasi masyarakat. Sasaran pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam arti masyarakat diharuskan berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan. Dengan demikian

masyarakat juga perlu diberikan kesempatan untuk turut serta mengambil bagian dalam penyusunan suatu perencanaan usulan dalam proyek pembangunan, terutama di dalam penentuan proyek-proyek yang lebih di prioritaskan di desa agar tercipta bahwa benar-benar pembangunan adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah merupakan inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Mutlak diperlukan sesuai dengan hakekat pembangunan desa yang pada prinsipnya dilakukan dengan bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan pemerintah sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik.

Dalam pembangunan seharusnya partisipasi masyarakat desa wulukubun kecamatan skanto kabupaten Malaka diharapkan agar dalam pembangunan tersebut lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Kurangnya partisipasi masyarakat desa Laleten dalam berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan fisik yang ada di desa Laleten sering terhambat dan dalam pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal khususnya dalam pembangua fisik berupa pembangunan jalan sertu,tembok penahan jalan dan saluran air.

Dalam pembangunan tersebut semuanya dilaksanakan oleh pihak kontraktor, yang sudah disepakati oleh kepala desa, BPD dan semua tokoh masyarakat di desa Laleten.dan sesuai dengan program desa yang sudah diatur,sehingga dalam pelaksanaan pembangunan jalan di tiga tahun terakhir yaitu 2019,2020 dan 2021 pembangunan tersebut terlaksana pada tahun 2019 dengan jarak 400 meter dengan

jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.185.105.000; yang sudah ditetapkan dan pada tahun 2020 tidak terlaksana karena masalah anggaran dan selanjutnya terlaksana pada tahun 2021 dengan jarak 300 meter, dengan jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.145.600.000; yang sudah ditetapkan. Jadi pembangunan jalan yang terlaksana pada tahun 2019 dan 2021 bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan layanan kepada masyarakat sesuai peraturan desa, petunjuk dan hasil pemerintah daerah kabupaten Malaka, pelaksanaan bantuan pemerintah yang dibiayai oleh Dana Desa (DD) Desa untuk pembangunan jalan dengan sepanjang 700 Meter.

Tabel 1.1.Data Pembangunan Fisik

No	Tahun	Jenis Pembangunan	Volume	Besarnya Dana	Sumber Dana	Ket
1	2019	Pembangunan Jalan	400 Meter	Rp. 185.105.000	DD	Tuntas
2	2020	Pembangunan Jalan	-	-	-	Tidak Tuntas
3	2021	Pembangunan Jalan	300 Meter	Rp.145.600.000	DD	Tuntas

Sumber: Data Desa Laleten Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dalam pembangunan jalan di desa Laleten terlaksana tetapi di tahun yang berbeda yaitu pada tahun 2019 dan 2021 dengan jumlah 700meter sedangkan pada tahun 2020 tidak terlaksana karena masalah anggaran yang kurang keterbukaan dari pihak pemerintah desa dengan masyarakat setempat.

Pemerintah desa berperan penting dalam mewujudkan pembangunan yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan

masyarakat desa. Sebagaimana pasal 1 ayat 9 tahun 2013 undang-undang tentang desa menyebutkan bahwa kawasan pedesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan suasana fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Masyarakat sebagai salah satu subsistem suatu desa seharusnya dilibatkan dalam proses pembangunan di desa keterlibatan itu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi hasil pembangunan. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat maka belum tentu pembangunan tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Peran serta masyarakat merupakan faktor penting dalam pembangunan desa. Peran serta masyarakat yang tinggi dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam pembangunan partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa atau kepala desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar, kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu pembangunan desa itu sendiri.

Namun ada sebagian anggota masyarakat dapat membantu dalam hal memberikan sumbangan pandangan, pikiran dan tenaga. Kesiediaan masyarakat dapat membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa

berarti mengorbankan kepentingan diri. Tentu saja partisipasi seperti ini suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Berdasarkan pengamatan dalam melaksanakan pembangunan jalan di desa Laleten tidak berjalan lancar karena pelaksanaan pembangunan masih lambat dalam penyelesaian. Kurangnya transparansi dari pemerintah setempat dengan masyarakat dana pembangunan sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan di desa Laleten masih kurang adanya motivasi terhadap masyarakat, selain itu juga pemerintah setempat masih kurang dalam menggerakkan masyarakat untuk mengikuti program pembangunan. Pemerintah desa melakukan proses perencanaan pembangunan tidak melibatkan masyarakat dalam hal ini hanya sebagian masyarakat yang dilibatkan. dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat belum merasakan bagaimana pembangunan yang ada di desa Laleten tidak ada sosialisasi kepada masyarakat tentang program pembangunan yang ada.

Berpijak dari masalah di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Lateten Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka Penulis dapat merumuskan masalah yaitu Bagaimanakah Model partisipasi masyarakat dalam pembangunan Fisik di Desa Laleten Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Laleten Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka.

1.4.Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang di kemukakan di atas ,maka penelitian di harapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep partisipasi masyarakat dalam pembanguana desa
- b) Sebagai bahan referensi untuk pemerintah desa melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah agar Lebih responsive terhadap masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian.
- b) Sebagai masukan dalam pemerintah desa laleten agar masyarakat terus berpartisipasi dalam pembangunan.